RUANG LINGKUP KEPENGAWASAN DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN

Shelty D.M. Sumual¹, Michella Christy Tania Supit², Anastasya Fabiola Matindas³,
Christian Bagensa⁴

sheltysumual@unima.ac.id¹, supitmichella9@gmail.com², anastasyamatindas10@gmail.com³,
chandra.bagensa@gmail.com⁴

Pascasarjana Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian pengawasan pendidikan, tujuan dan fungsi pengawasan, jenis-jenis pengawasan pendidikan, pengertian tata kelola pendidikan, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. pengawasan pendidikan memiliki dimensi yang luas. Ia mencakup fungsi pembinaan, evaluasi, dan peningkatan mutu, yang kesemuanya harus dilakukan secara profesional, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi instrumen kontrol, tetapi juga strategi penguatan mutu yang berbasis kolaborasi antara pengawas, guru, dan pihak manajemen sekolah. tata kelola pendidikan bukan sekadar pengelolaan administratif, tetapi merupakan suatu pendekatan menyeluruh yang mengarahkan lembaga pendidikan untuk berfungsi secara optimal sesuai dengan mandat konstitusional dan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan perlu terus dikembangkan dalam praktik tata kelola agar pendidikan dapat benar-benar menjadi alat transformasi sosial.

Kata Kunci: Pengawasan, Tata Kelola, Pendidikan.

ABSTRACT

This study aims to describe the definition of educational supervision, the purpose and function of supervision, the types of educational supervision, the definition of educational governance, and the principles of good governance. The research method used is a literature study. educational supervision has a broad dimension. It includes the functions of guidance, evaluation and quality improvement, all of which must be carried out professionally, continuously and oriented towards improving the quality of education. Thus, supervision is not only an instrument of control, but also a quality strengthening strategy based on collaboration between supervisors, teachers, and school management. education governance is not just administrative management, but is a comprehensive approach that directs educational institutions to function optimally in accordance with constitutional mandates and community needs. Principles such as transparency, participation, accountability and fairness need to be continuously developed in governance practices so that education can truly become a tool for social transformation.

Keywords: Oversight, Governance, Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Namun, di Indonesia, tata kelola pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Salah satu isu utama adalah rendahnya integritas dalam sistem pendidikan, yang tercermin dari berbagai praktik koruptif dan ketidakdisiplinan di lingkungan pendidikan. Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa skor integritas pendidikan Indonesia berada pada angka 73,7 dari skala 1-100, menunjukkan bahwa perilaku koruptif masih marak terjadi dalam tata kelola pendidikan .

Praktik-praktik koruptif yang ditemukan meliputi gratifikasi, pungutan liar, kolusi

dalam pengadaan barang dan jasa, serta nepotisme dalam penerimaan siswa baru. Selain itu, masih banyak ditemukan kasus plagiarisme oleh guru dan dosen, serta ketidakdisiplinan dalam mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan belum kondusif untuk menegakkan nilai-nilai integritas, yang seharusnya menjadi landasan dalam proses pembelajaran.

Selain masalah integritas, sistem pendidikan Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal kurikulum dan infrastruktur. Survei Global Education Monitor 2023 oleh Ipsos menunjukkan bahwa 62% masyarakat Indonesia merasa bahwa akses terhadap pendidikan masih tidak merata, dan 40% menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan masih belum memadai. Kurikulum yang ketinggalan zaman dan infrastruktur yang tidak memadai turut memperparah kondisi ini, sehingga menghambat proses belajar mengajar yang efektif.

Permasalahan tata kelola pendidikan juga berkaitan erat dengan desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Sejak reformasi desentralisasi pada tahun 1999, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Namun, studi oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pendidikan di tingkat lokal masih lemah, dengan hanya sedikit perbaikan yang terjadi antara tahun 2009 dan 2012. Kelemahan dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar daerah.

Pentingnya kajian mendalam terhadap ruang lingkup pengawasan dan tata kelola pendidikan menjadi semakin mendesak dalam konteks ini. Dari perspektif keilmuan, pendekatan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pendidikan menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Menurut teori tata kelola pendidikan, keberhasilan sistem pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam praktik sehari-hari. Sebagaimana dikemukakan oleh World Bank, "*better education governance is associated with better education performance*".

Dalam konteks internasional, pengalaman negara-negara seperti Skotlandia menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam kurikulum dan variabilitas dalam pengajaran dapat menyebabkan penurunan kinerja akademik. Kritik terhadap Kurikulum for Excellence di Skotlandia menyoroti bahwa kurangnya kejelasan dalam konten kurikulum dan penilaian menyebabkan variasi kualitas pendidikan antar sekolah, yang pada akhirnya berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan tata kelola yang efektif sangat penting dalam memastikan konsistensi dan kualitas pendidikan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya sistematis dalam memperkuat integritas dan tata kelola pendidikan di Indonesia. KPK merekomendasikan penguatan integritas ekosistem pendidikan melalui keteladanan oleh tenaga pendidik dan pimpinan satuan pendidikan, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Selain itu, perlu dilakukan reformasi kurikulum dan peningkatan infrastruktur pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dalam kerangka ini, kajian akademik yang mendalam mengenai ruang lingkup pengawasan dan tata kelola pendidikan sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami secara komprehensif permasalahan yang ada dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat berkembang menuju arah yang lebih baik, adil, dan berkualitas.

METODOLOGI

Metode pada penulisan ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian tersebut. menurut Nazir (2003) Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Juga, Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memastikan mutu serta efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya sekadar kontrol administratif, melainkan juga melibatkan pembinaan profesional untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Menurut Mulyasa (2021), pengawasan pendidikan adalah proses pembinaan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam meningkatkan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme mereka. Artinya, pengawasan bukanlah kegiatan yang bersifat mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana untuk membangun dan memperbaiki mutu pendidikan secara kolaboratif.

Senada dengan itu, Sudrajat (2022) menjelaskan bahwa pengawasan pendidikan merupakan bagian dari fungsi manajemen pendidikan yang bertugas melakukan penilaian dan pendampingan terhadap kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah, serta pelaksanaan kurikulum. Tujuannya agar seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar nasional pendidikan. Ia menekankan bahwa dalam era otonomi pendidikan saat ini, pengawas juga harus adaptif terhadap dinamika kebijakan dan perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hamid dan Rosnita (2023) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengawas, pola komunikasi antara pengawas dan guru, serta dukungan kelembagaan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengawasan yang bersifat partisipatif cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan kinerja guru dibandingkan pendekatan yang bersifat otoritatif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pendidikan memiliki dimensi yang luas. Ia mencakup fungsi pembinaan, evaluasi, dan peningkatan mutu, yang kesemuanya harus dilakukan secara profesional, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi instrumen kontrol, tetapi juga strategi penguatan mutu yang berbasis kolaborasi antara pengawas, guru, dan pihak manajemen sekolah.

B. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Pengawasan dalam konteks manajemen pendidikan merupakan suatu proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam sistem tata kelola

pendidikan, pengawasan bukan hanya sekadar alat kontrol, melainkan juga bagian integral dari proses peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Sagala, 2021). Pengawasan bertujuan agar semua komponen pendidikan seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan peserta didik dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan.

Menurut Suparman (2022), tujuan utama dari pengawasan pendidikan adalah memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan, serta sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Pengawasan juga memiliki peran dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pelaksana pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan manajemen sekolah.

Fungsi pengawasan tidak hanya terbatas pada aspek evaluatif, tetapi juga mencakup aspek pembinaan. Artinya, dalam proses pengawasan, pengawas pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membimbing, memberikan arahan, dan meningkatkan kapasitas profesional tenaga pendidik (Muttaqin & Nursalam, 2021). Dengan demikian, pengawasan berperan sebagai sarana untuk mendorong perbaikan terus-menerus (continuous improvement) dalam sistem pendidikan.

Lebih lanjut, Sudrajat (2023) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan, mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat, serta memperkuat tata kelola lembaga pendidikan. Fungsi pengawasan dalam hal ini menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan regulasi dan mencapai hasil yang diharapkan.

Secara ringkas, tujuan dan fungsi pengawasan dalam pendidikan dapat dikategorikan menjadi empat aspek utama: (1) memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar, (2) meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja guru, (3) mencegah terjadinya penyimpangan, dan (4) mendukung akuntabilitas dan transparansi. Keempat aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas.

C. Jenis-jenis Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem manajemen pendidikan yang bertujuan untuk menjamin mutu dan keberlanjutan proses belajar mengajar. Dalam praktiknya, pengawasan pendidikan memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan tujuan, objek, serta pendekatan yang digunakan. Jenis-jenis pengawasan ini menjadi dasar dalam perencanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenjang.

Menurut Suparno (2021), pengawasan pendidikan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, salah satunya adalah berdasarkan sifatnya, yang dibedakan menjadi pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sementara pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan berlangsung, untuk menilai dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai.

Sementara itu, Hasibuan (2022) membagi jenis pengawasan pendidikan berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu pengawasan awal, pengawasan saat proses, dan pengawasan akhir. Pengawasan awal dilakukan sebelum kegiatan pendidikan dimulai, untuk memastikan kesiapan program. Pengawasan saat proses dilakukan saat kegiatan berlangsung, untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana. Adapun pengawasan akhir dilakukan setelah kegiatan selesai, untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Jenis lainnya yang juga penting adalah pengawasan internal dan eksternal. Munir (2023) menjelaskan bahwa pengawasan internal dilakukan oleh pihak dalam institusi

pendidikan, seperti kepala sekolah atau pengawas sekolah dari dinas pendidikan. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar, misalnya dari lembaga akreditasi atau auditor independen. Kedua bentuk pengawasan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2021) menekankan pentingnya pengawasan berbasis digital, khususnya di era pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, jenis pengawasan baru muncul yaitu pengawasan berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara daring (online), efisien, dan real time.

Secara umum, jenis-jenis pengawasan pendidikan memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan mutu pendidikan tetap terjaga. Variasi jenis pengawasan ini juga memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika dan tantangan yang ada di lapangan. Dengan memahami karakteristik masing-masing jenis pengawasan, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan strategi pengawasan agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna.

D. Pengertian Tata Kelola Pendidikan

Tata kelola pendidikan merupakan suatu pendekatan sistemik yang melibatkan berbagai aspek pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Konsep tata kelola pendidikan berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam sistem pendidikan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Menurut Sihombing (2021), tata kelola pendidikan adalah suatu proses pengelolaan sumber daya pendidikan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan guna menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik. Tata kelola ini melibatkan aktor-aktor seperti pemerintah, sekolah, masyarakat, dan peserta didik, yang semuanya berperan dalam memastikan jalannya pendidikan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

Secara umum, tata kelola pendidikan mencakup dimensi struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, perencanaan program, distribusi anggaran, dan sistem evaluasi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf dan Arifin (2022), bahwa tata kelola pendidikan yang baik (good education governance) adalah praktik penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Zainuddin (2023) menambahkan bahwa tata kelola pendidikan bukan hanya berkaitan dengan teknis administrasi, tetapi juga mencakup dimensi kebijakan, budaya organisasi, serta partisipasi warga sekolah. Misalnya, pengambilan keputusan yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua merupakan bagian dari tata kelola demokratis yang dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan.

Pentingnya tata kelola yang baik dalam dunia pendidikan juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang dikelola dengan baik akan mampu menjawab tantangan zaman dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, prinsip good governance yang diterapkan dalam bidang pendidikan menjadi sangat relevan, seperti ditegaskan oleh Suryadi (2021), bahwa tata kelola pendidikan yang efektif harus mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi integritas dan kolaborasi.

Dengan demikian, tata kelola pendidikan bukan sekadar pengelolaan administratif, tetapi merupakan suatu pendekatan menyeluruh yang mengarahkan lembaga pendidikan untuk berfungsi secara optimal sesuai dengan mandat konstitusional dan kebutuhan

masyarakat. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan perlu terus dikembangkan dalam praktik tata kelola agar pendidikan dapat benar-benar menjadi alat transformasi sosial.

E. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

Tata kelola yang baik (*good governance*) dalam bidang pendidikan merupakan aspek krusial dalam menjamin tercapainya kualitas layanan pendidikan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak hanya menjadi landasan manajerial dalam mengelola institusi pendidikan, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas dan integritas penyelenggara pendidikan dalam menyelenggarakan layanan publik. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip tata kelola yang baik meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum (UNDP, 2021). Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip ini diadaptasi untuk memperkuat sistem pendidikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menghadapi tantangan global.

Salah satu prinsip utama dalam tata kelola pendidikan adalah partisipasi. Prinsip ini menekankan pentingnya pelibatan semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Menurut studi yang dilakukan oleh Fauzi dan Herlina (2021), partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap kualitas pendidikan. Hal ini menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan demokratis, yang berdampak pada meningkatnya mutu layanan pendidikan.

Transparansi merupakan prinsip penting lainnya dalam tata kelola pendidikan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dan akses yang luas terhadap kebijakan, anggaran, dan program pendidikan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada publik. Menurut Nurdin dan Sari (2022), transparansi dalam manajemen sekolah, terutama dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berperan penting dalam mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Selanjutnya, akuntabilitas mengacu pada kewajiban institusi pendidikan dan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemangku kepentingan. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks evaluasi kinerja guru, kepala sekolah, dan pengelola pendidikan lainnya. Menurut penelitian oleh Lubis dan Ramadhani (2023), penerapan sistem evaluasi berbasis kinerja dan pelaporan publik terhadap hasil pendidikan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong terciptanya budaya mutu dalam institusi pendidikan.

Efektivitas dan efisiensi juga menjadi prinsip dasar dalam tata kelola yang baik. Efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai, sedangkan efisiensi menekankan penggunaan sumber daya secara optimal. Dalam dunia pendidikan, prinsip ini menuntut adanya sistem perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, dan penganggaran yang cermat. Menurut Kurniawan (2021), banyak sekolah di Indonesia yang belum menerapkan prinsip efisiensi secara maksimal, misalnya dalam distribusi tenaga pendidik yang belum merata serta pengelolaan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Prinsip penegakan hukum (*rule of law*) menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini mencakup penerapan peraturan pendidikan secara adil dan konsisten, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan tidak diskriminatif. Dalam kajiannya, Rahmawati dan Prasetyo (2021)

menekankan bahwa lemahnya penegakan aturan di sektor pendidikan sering kali menjadi hambatan dalam pencapaian mutu pendidikan yang merata.

Selain prinsip-prinsip di atas, keadilan sosial atau equity juga mulai dilihat sebagai bagian penting dari tata kelola pendidikan modern. Prinsip ini mendorong akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau geografis. Sebuah studi oleh Wahyuni dan Suryadi (2023) menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kesempatan belajar bagi kelompok marginal.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pendidikan tentunya menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kapasitas manajerial yang belum merata di setiap satuan pendidikan. Selain itu, adanya resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan anggaran dan teknologi, menjadi hambatan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas pelatihan bagi tenaga kependidikan, dan mengembangkan sistem monitoring serta evaluasi yang terukur.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pendidikan bukan sekadar konsep normatif, melainkan pedoman praktis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Implementasinya memerlukan komitmen, kolaborasi, dan keberlanjutan agar dapat menciptakan sistem pendidikan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengawasan pendidikan memiliki dimensi yang luas. Ia mencakup fungsi pembinaan, evaluasi, dan peningkatan mutu, yang kesemuanya harus dilakukan secara profesional, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi instrumen kontrol, tetapi juga strategi penguatan mutu yang berbasis kolaborasi antara pengawas, guru, dan pihak manajemen sekolah.

Tata kelola pendidikan bukan sekadar pengelolaan administratif, tetapi merupakan suatu pendekatan menyeluruh yang mengarahkan lembaga pendidikan untuk berfungsi secara optimal sesuai dengan mandat konstitusional dan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan perlu terus dikembangkan dalam praktik tata kelola agar pendidikan dapat benar-benar menjadi alat transformasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, M., & Herlina, T. (2021). Partisipasi masyarakat dalam tata kelola sekolah dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 113-125. <https://doi.org/10.17509/jap.v28i2.34567>
- Hamid, R., & Rosnita. (2023). Efektivitas Pengawasan Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah Menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 45-56. <https://doi.org/10.21009/jmp.v14i1.1234>
- Hasibuan, J. (2022). *Manajemen Pendidikan dan Supervisi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Kemendikbudristek. (2021). *Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Berbasis Teknologi*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- Kurniawan, D. (2021). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 45-58.

- <https://doi.org/10.21009/jmp.v9i1.23100>
- Lubis, R., & Ramadhani, S. (2023). Akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan: Kajian empiris di Sumatera Utara. *Journal of Educational Management and Leadership*, 5(1), 22–34. <https://doi.org/10.31227/jeml.v5i1.2023>
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2023). *Pengawasan Pendidikan: Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Muttaqin, M., & Nursalam, N. (2021). Supervisi Pendidikan sebagai Instrumen Peningkatan Mutu Sekolah. *Jurnal Kependidikan: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, 7(2), 144–155. <https://doi.org/10.23917/jk.v7i2.14782>
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, M., & Sari, D. (2022). Transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah dasar negeri. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 14(2), 75–88. <https://doi.org/10.26858/jpk.v14i2.45678>
- Rahmawati, N., & Prasetyo, A. (2021). Penegakan hukum dalam manajemen pendidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 3(2), 149–162. <https://doi.org/10.33345/jhp.v3i2.2021>
- Sagala, S. (2021). *Manajemen Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya dalam Dunia Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sihombing, S. R. (2021). *Manajemen Pendidikan dan Tata Kelola Sekolah di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudrajat, A. (2023). Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 28(1), 78–90. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v28i1.2482>
- Sudrajat, A. (2022). *Supervisi Pendidikan di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparno, S. (2021). *Supervisi Pendidikan: Konsep dan Aplikasi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparman, U. (2022). Tujuan Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Manajemen Modern. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 45–59. <https://doi.org/10.21580/jmpi.2022.10.1.1123>
- Suryadi, D. (2021). Prinsip Tata Kelola Pendidikan untuk Penguatan Mutu Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, *5*(2), 101–110. <https://doi.org/10.23887/jmpi.v5i2.38451>
- Syaibani, R. 2012. *Studi Kepustakaan*, (Online), (<http://repository.usu.ac.id/bitstream>, diakses 4 Oktober 2016).
- Wahyuni, F., & Suryadi, A. (2023). Pemerataan akses pendidikan melalui tata kelola berbasis keadilan sosial. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 53(1), 89–101. <https://doi.org/10.21009/jpp.53.1.2023>
- Yusuf, M., & Arifin, Z. (2022). Good Governance dalam Pendidikan: Telaah Teoritis dan Implementasinya di Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, *9*(1), 45–56. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v9i1.3201>
- Zainuddin, M. (2023). *Tata Kelola Lembaga Pendidikan: Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- https://www.ipsos.com/en-id/ipsos-education-monitor-2024-indonesia?utm_source=chatgpt.com "Ipsos Education Monitor 2024 [Indonesia] | Ipsos"
- https://www.jawapos.com/nasional/014603240/hasil-survei-kpk-integritas-di-sekolah-masih-lemah?utm_source=chatgpt.com "Hasil Survei KPK, Integritas di Sekolah Masih Lemah - Jawa Pos"
- https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3412-hasil-spi-pendidikan-2023-pembangunan-integritas-sektor-pendidikan-perlu-diperkuat?utm_source=chatgpt.com "Hasil SPI Pendidikan 2023: Pembangunan Integritas Sektor Pendidikan Perlu Diperkuat"
- https://fin.co.id/2024/04/30/kpk-tata-kelola-pendidikan-masih-koruptif-ada-gratifikasi-pungli-korupsi-dan-nepotisme?utm_source=chatgpt.com "KPK: Tata Kelola Pendidikan Masih

Koruptif, Ada Gratifikasi, Pungli, Korupsi dan Nepotisme"
https://nasional.okezone.com/read/2024/04/30/337/3002718/skor-integritas-pendidikan-indonesia-737-kpk-tata-kelolanya-masih-koruptif?utm_source=chatgpt.com "Skor Integritas Pendidikan Indonesia 73,7, KPK : Tata Kelolanya Masih Koruptif : Okezone Nasional"
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20230705-survei-kpk-2022-ekosistem-pendidikan-belum-mendukung-internalisasi-nilai-integritas?utm_source=chatgpt.com "Survei KPK 2022: Ekosistem Pendidikan Belum Mendukung Internalisasi Nilai Integritas"
https://www.ipsos.com/en-id/global-education-monitor-indonesia-2023?utm_source=chatgpt.com "Global Education Monitor - Indonesia | Ipsos"
https://blogs.worldbank.org/en/education/indonesia-tackling-education-inequality-through-better-governance?utm_source=chatgpt.com "In Indonesia, Tackling Education Inequality Through Better Governance"
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/26/local-governance-and-education-performance-in-indonesia?utm_source=chatgpt.com "Local Governance and Education Performance in Indonesia: Surveying the Quality of Local Education Governance in 50 Districts"
https://www.thetimes.co.uk/article/how-to-fix-scottish-education-by-the-ones-who-ought-to-know-8vzhvxn5v?utm_source=chatgpt.com "How to fix Scottish education, by the ones who ought to know"